



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAYAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 485512

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **895.000.000**

1. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN
Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN
Rp. 235.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/162 m2 di KAB / KOTA ACEH
BESAR, WARISAN Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **123.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA NEWAVANZA VELOZ 1.5 M/T Tahun 2013,
HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 28D9AL115S(MIO) Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **3.950.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **14.536.915**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.036.486.915**

III. HUTANG **Rp.** **319.863.996**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **716.622.919**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.